

ABSTRACT

The purpose of this graduation paper is to evaluate the implementation of Regional Regulation and Mayor Regulation as the base of correspondence management in Yogyakarta Culture Agency. As a part of the state institution within the Yogyakarta region, the Yogyakarta Culture Agency uses the Regional Regulation and Mayor Regulation as the implementation basis for the agency administrative system. It is a form of Yogyakarta Culture Agency compliance against the existing legislation.

The writer fulfilled an internship program for two months from January 9th, 2017 to March 9th, 2017 in Yogyakarta Culture Agency. The writer uses the research method of interviews, writing field notes, and documentation in the form of photos as a method of collecting data qualitatively. Yogyakarta Regional Regulation Number 88 of 2010, Yogyakarta Mayor Regulation Number 100 of 2010, and Yogyakarta Mayor Regulation Number 42 of 2013 are used by the writer as the main source of this graduation paper. The writer also utilizes written sources from books and internet as a supporting sources.

The writer uses the personal experience obtained during the internship period which has been carried out by the writer in Yogyakarta Culture Agency as a General Affair and Human Resource Sub Division staff in writing this graduation paper. Discussion is about the problems, evaluation, and impacts that arise in the Regional Regulation and Mayor Regulation implementation as the base of correspondence management. The research shows that the regulations are not fully implemented in the correspondence management activity within the Yogyakarta Culture Agency environment. Those can be caused of two main factors which are the regulation absence and the lack of regulation clarity concerning the aspect in correspondence management.

Keywords: Yogyakarta Culture Agency, Correspondence Management, Regional Regulation, Mayor Regulation

Tujuan dari tugas akhir ini ialah untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai dasar manajemen korespondensi di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Sebagai bagian dari institusi negara dalam wilayah Yogyakarta, maka Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menggunakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai dasar pelaksanaan sistem administrasi kedinasan. Hal tersebut merupakan bentuk kepatuhan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Penulis melaksanakan program magang selama dua bulan sejak 9 Januari 2017 hingga 9 Maret 2017 di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Penulis memanfaatkan metode penelitian wawancara, menulis catatan lapangan, serta dokumentasi berupa foto sebagai metode pengumpulan data secara kualitatif. Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2010, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2013 penulis gunakan sebagai sumber utama penulisan tugas akhir ini. Penulis juga memanfaatkan sumber tertulis dalam buku dan internet sebagai sumber pendukung.

Penulis menggunakan pengalaman pribadi yang didapatkan pada periode magang yang telah penulis laksanakan di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta sebagai staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam penulisan tugas akhir ini. Pembahasan adalah mengenai permasalahan, evaluasi, serta dampak yang muncul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai dasar manajemen korespondensi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan dalam kegiatan manajemen korespondensi di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor utama yaitu tidak adanya peraturan terkait atau kurang jelasnya sebuah peraturan mengenai salah satu aspek dalam manajemen korespondensi.

Kata kunci: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Manajemen Korespondensi, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota